

PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM AKSI KONVERGENSI PENANGANAN STUNTING DI KABUPATEN BLITAR

Sri Juni Woro Astuti¹, Esa Wahyu Endarti², Diana Heni Lestari³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Wijaya Putra

Email srijuniworo@uwp.ac.id; esawahyuendarti@uwp.ac.id; dianahenisrilestari@gmail.com

Abstract :

Stunting is a serious issue that requires attention from all stakeholders, including both government agencies and the public on a local level. Due to this, Indonesian Government has announced eight convergences action to reduce stunting prevalence become 14% in 2024. So all stakeholders are expected to make preventing stunting a top priority in each individual region's agenda for human development. With the intention of making the execution of this particular act of convergence more effective, the participation will become a crucial factor. For this reason, the focus of the current study is to determine how the society and privat sector will participate in upcoming convergence activities. The research was conducted in Blitar district as one of the areas with relatively low stunting rates so it is hoped that it will become best practice research. The research method uses descriptive qualitative and data collection through interviews and secondary data. The analysis is based on the participation ladder theory, and shows that only a few activities from the convergence action involve public and private participation. So researchers recommend that the community really be the main actor in this convergence action so that stunting reduction is achieved.

Key Words: Participation, Convergence, Stunting

Abstrak :

Stunting merupakan permasalahan serius yang memerlukan perhatian seluruh pemangku kepentingan, baik instansi pemerintah maupun masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia telah mencanangkan delapan aksi konvergensi untuk menurunkan prevalensi stunting menjadi 14% pada tahun 2024. Untuk itu seluruh pemangku kepentingan diharapkan menjadikan pencegahan stunting sebagai prioritas utama dalam agenda pembangunan manusia di daerah. Agar pelaksanaan aksi konvergensi ini lebih efektif, partisipasi akan menjadi faktor yang sangat penting. Oleh karena itu, fokus studi ini adalah untuk mengkaji bagaimana partisipasi masyarakat dan sektor swasta dalam aksi konvergensi tersebut. Penelitian dilakukan di kabupaten Blitar sebagai salah satu daerah dengan angka stunting yang relatif rendah sehingga diharapkan menjadi penelitian best practice. Metode penelitian menggunakan deskriptif kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara dan data sekunder. Analisis yang didasarkan pada teori tangga partisipasi menunjukkan bahwa hanya sedikit kegiatan dari aksi konvergensi yang melibatkan partisipasi publik dan swasta. Maka peneliti menyarankan agar masyarakat benar-benar menjadi aktor utama dalam aksi konvergensi ini agar target penurunan stunting benar-benar tercapai tidak sekedar di atas kertas

Kata kunci : Partisipasi, Konvergensi, Stunting

Pendahuluan

Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita atau bayi dibawah umur 5 tahun akibat dari kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya. Kekurangan gizi ini terjadi sejak bayi masih dalam kandungan, kondisi stunting ini baru nampak setelah bayi berusia 2 tahun. Dampak dari stunting diantaranya yaitu mengakibatkan anak mengalami kesulitan dalam perkembangan fisik dan kognitif optimal seperti kesulitan berbicara, berjalan, hingga sering mengalami sakit. Dapat disimpulkan dari dampak tersebut maka stunting dapat mempengaruhi kualitas sumber daya manusia sebagai generasi penerus bangsa di masa mendatang. Dalam penelitian lain Stunting juga disebabkan oleh beberapa faktor lainnya, yaitu faktor genetik, pola asuh, dan perilaku hidup bersih dan sehat. Pada penelitian ini menunjukkan bahwa pola asuh merupakan faktor risiko kejadian stunting, sedangkan faktor genetik dan diare merupakan faktor protektif kejadian stunting pada balita (Fadilah, Siti Nadiyah Nurul, 28 Oktober 2019).

Menurut World Health Organization (WHO, 2015), Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar. Selanjutnya menurut WHO (2020) stunting adalah pendek atau sangat pendek berdasarkan panjang / tinggi badan menurut usia yang kurang dari -2 standar deviasi (SD) pada kurva pertumbuhan WHO yang terjadi dikarenakan kondisi irreversibel akibat asupan nutrisi yang tidak adekuat dan/atau infeksi berulang / kronis yang terjadi dalam 1000 HPK (Desi Fajar Susanti.2022). Selanjutnya WHO juga melansir penyebab stunting adalah gizi buruk, infeksi berulang, dan kurangnya stimulasi psikososial. Risiko terkena stunting bertambah tinggi jika ketika masa kehamilan ibu hamil tersebut mengalami infeksi malaria, HIV, dan hipertensi. Ibu hamil yang tidak mencukupi kebutuhan gizinya juga meningkatkan risiko anak terkena stunting (Berita. Kompas.com.2022)

Stunting jika tidak segera diatasi dengan serius dalam jangka panjang sangat membahayakan keberlangsungan suatu bangsa, dikarenakan jika suatu generasi banyak mengalami stunting maka kedepan produktivitas nasional akan rendah. Anak-anak yang saat itu tumbuh stunting kemungkinan akan memiliki kesempatan pendidikan dan pekerjaan yang terbatas. Selanjutnya generasi tersebut akan hidup dalam lingkaran kemiskinan dikarenakan kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang terbatas. Jika kondisi tersebut tidak segera diatasi dengan serius maka sangat besar kemungkinan bangsa kita kedepan akan menanggung beban ekonomi yang berat karena orang yang masa kecilnya stunting kelak jika dewasa cenderung memiliki pendapatan yang rendah pula.

Kasus stunting di Jawa Timur tergolong masih cukup tinggi. Hal ini menjadi komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur dan seluruh kabupaten Kota di Jawa Timur untuk menekan angka prevalensi stunting. Demikian pula di Pemerintah Kabupaten Blitar yang berkomitmen untuk menekan angka Stunting guna menuju generasi Indonesia Emas. Pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) berkomitmen terus melangkah dan berupaya menekan angka kasus stunting (Zero Stunting). Untuk di Jawa Timur dari 38 kabupaten/kota, Kabupaten Blitar masuk 5 terbaik. Meskipun tergolong aman, tapi tidak boleh lengah dan justru harus terus ditingkatkan dalam penanganannya agar dapat menekan kasus Stunting. Angka prevalensi kasus stunting Kabupaten

Blitar menurun tipis hanya 0,2 % dimana pada tahun 2021 berada pada angka 14,5 persen menjadi 14,3 % pada tahun 2022 dan hingga saat ini pemantauan untuk pencegahan kasus stunting masih tetap berjalan (Mediaindonesia.com, 22 Agustus 2023)

Dari 22 kecamatan di Kabupaten Blitar, ada sebanyak 12 kecamatan yang menjadi lokasi fokus stunting, yaitu kecamatan Kademangan, Gandusari, Kanigoro, Sanankulon, Garum, Selorejo, Selopuro, Wates, Bakung, Udanawu, Doko, dan Wlingi. Pemerintah dalam hal ini Dinas Kesehatan sudah melakukan banyak hal guna mencegah kasus Stunting Di Kabupaten Blitar, contohnya yaitu melakukan deteksi dini pada balita stunting, pelayanan kesehatan pada calon pengantin (catin), pelayanan kesehatan pada ibu hamil, ibu bersalin, dan ibu nifas, serta melakukan imunisasi dasar lengkap. Prevelensi stunting di Kabupaten Blitar jauh dibawah Provinsi Jatim dan Nasional. Berdasarkan Survey Status Gizi Indonesia pada tahun 2021 prevelensi stunting Kabupaten Blitar di angka 14,5 persen, jauh di bawah provinsi sebesar 23,5 persen (mediaindonesia.com, 22 Agustus 2023).

Sebagaimana diketahui Pemerintah Indonesia mencanangkan strategi utama guna menangani kasus Stunting, seperti yang terdapat pada Peraturan Presiden No. 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi. Strategi utama Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi meliputi:

- a. menjadikan perbaikan gizi sebagai arus utama pembangunan sumber daya manusia, sosial budaya, dan perekonomian;
- b. peningkatan kapasitas dan kompetensi sumber daya manusia di semua sektor baik pemerintah maupun swasta;
- c. peningkatan intervensi berbasis bukti yang efektif pada berbagai tatanan yang ada di masyarakat; dan
- d. peningkatan partisipasi masyarakat untuk penerapan norma-norma sosial yang mendukung perilaku sadar gizi.

Untuk menekan prevalensi stunting tentu bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, melainkan diperlukan partisipasi semua pihak termasuk kalangan swasta (pengusaha) dan masyarakat agar dapat mencapai target prevalensi stunting yang lebih rendah. Masyarakat juga masih perlu diberikan pemahaman melalui Penyuluhan sosial dan edukasi tentang bahaya stunting dan bagaimana Upaya untuk pencegahannya. Dengan demikian sangat diperlukan adanya peran para penyuluh social untuk menjadi inisiator penggerak Masyarakat agar berpartisipasi aktif dalam pencegahan dan penanganan stunting.

Partisipasi secara sederhana dapat dipahami sebagai keikutsertaan masyarakat dalam program pembangunan (Suryono, 2001). Menurut Hetifah Sj. Soemarto (2003), partisipasi masyarakat adalah proses ketika warga sebagai individu maupun kelompok sosial dan organisasi, mengambil peran serta ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan kebijakan-kebijakan yang langsung mempengaruhi kehidupan mereka. Sedangkan untuk dimensi partisipasi Menurut Tjokroamidjojo ada tiga dimensi untuk mewujudkan partisipasi masyarakat yaitu, Partisipasi dalam tahap perencanaan, Partisipasi dalam tahap pelaksanaan, dan Partisipasi dalam tahap implementasi Tindakan (Kali, 2011).

Selanjutnya menurut Dwiningrum (2011), terdapat empat jenis partisipasi, yaitu:

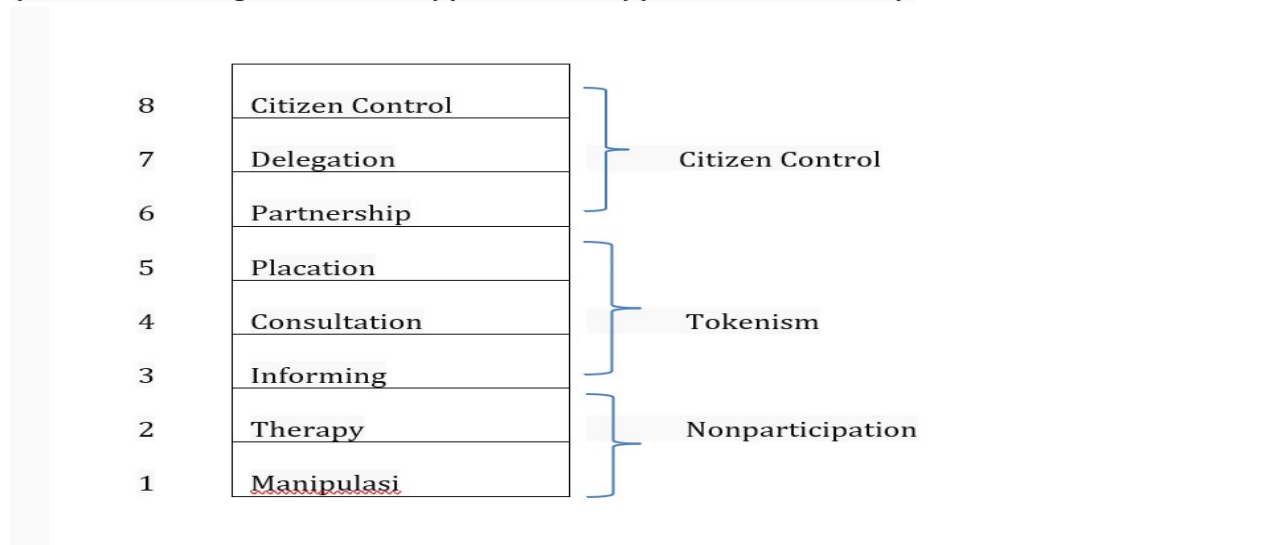
1. Partisipasi dalam pengambilan keputusan. Partisipasi ini dapat berupa pemberian gagasan atau ide yang diberikan Masyarakat terkait dengan kepentingan bersama. Sarana partisipasi ini biasanya disalurkan dalam berbagai forum pertemuan, rapat diskusi suatu kelompok komunitas dalam rangka merespon atau melaksanakan suatu program pemerintah.

2. Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi ini merupakan tindak lanjut dari gagasan atau keputusan yang disepakati sebelumnya, baik dalam tahap perencanaan program, pelaksanaan maupun evaluasi. Dalam partisipasi ini diperlukan penggerakan sumber daya baik berupa sumber dana, tenaga, teknologi dan lain-lain.

3. Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Setelah tahap pelaksanaan, partisipasi juga diperlukan pada tahap output dan outcome yang berupa pemanfaatan hasil kegiatan baik yang berkaitan dengan kuantitas maupun kualitas. Dari segi kualitas dapat dilihat dari output dan outcome, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat dari persentase keberhasilan program.

4. Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi masyarakat juga diperlukan pada tahap evaluasi kegiatan atau program yang bertujuan untuk memastikan apakah hasil yang diperoleh sesuai dengan tujuan yang direncanakan sebelumnya. Dalam hal ini masyarakat diharapkan berperan aktif memberi penilaian, masukan, bahkan kritikan guna memperbaiki kinerja program yang akan datang. Sehingga dengan adanya partisipasi pada konteks evaluasi program ini dapat mengukur tingkat ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya.

Ernstein mengklasifikasikan derajat partisipasi masyarakat kedalam 3 tingkatan yang kemudian dijabarkan menjadi enam jenjang yaitu: 1) Tidak partisipatif, terdiri dari jenjang manipulation dan therapy; 2) derajat partisipasi semu, terdiri dari information, consultation dan placation; 3) kekuatan Masyarakat yang terdiri dari partnership, delegated power, dan citizen control (Indriani, C., Asang, S., Hans, 2021)(Daniati, 2019)(Warouw et al., 2013).



Gambar1: Jenjang Partisipasi Arnstein
 Sumber: Indriani, C., Asang, S., Hans, 2021.

Beberapa penelitian terdahulu mengenai partisipasi masyarakat dalam penanganan stunting antara lain dilakukan oleh Asri Aulia (2021) dan Fuaida Kurnia Dewi (2021). Penelitian Asri aulia menggunakan metode campuran dan menganalisis tahap partisipasi masyarakat menurut teori partisipasi masyarakat Arnstein dimana terdapat 8 tingkat partisipasi yaitu: manipulation, therapy, informing, consultation, placement, partnership, delegated power dan citizen control. Hasil penelitian Asri menunjukkan bahwa partisipasi Masyarakat dalam menekan angka stunting relative tinggi baik di kecamatan Bojong Kaler Kota Bandung. Sedangkan hasil penelitian Fuaida yang melihat jenis partisipasi Masyarakat dalam bentuk ide pemikiran, harta benda, tenaga, ketrampilan, pola pemberian makanan, pola kebersihan dan partisipasi dalam layanan Kesehatan di Yogyakarta juga dinilai cukup baik.

Namun berbeda dengan penelitian di Kabupaten Garut, dimana partisipasi dinilai masih rendah. Rendahnya partisipasi masyarakat dalam pencegahan stunting yaitu 1) Kurangnya menjaga kebersihan lingkungan 2) Kurangnya pengetahuan ibu mengenai kesehatan dan gizi 3) Kesibukan orangtua 4) Kemiskinan. Penelitian tersebut juga mengidentifikasi factor penyebab rendahnya partisipasi masyarakat dikarenakan adanya hambatan baik dari dalam maupun dari luar. Faktor penghambat dari dalam yaitu 1) Umur 2) Jenis kelamin 3) Pengetahuan 4) Penghasilan dan Pekerjaan. Sedangkan hambatan d.ari luar yaitu kurangnya koordinasi dengan lintas sektor. Selain itu juga ada faktor pendukung partisipasi masyarakat dalam pencegahan stunting yaitu 1) Adanya kemauan untuk berpartisipasi 2) Adanya kemampuan untuk berpartisipasi 3) Adanya kesempatan untuk berpartisipasi (Nurbudiwati et al., 2020). Selain itu penelitian lain yang fokus pada koordinasi penanganan stunting menunjukkan partisipasi dalam rapat koordinasi masih kurang (Waliyudin et al., 2023).

Berdasarkan perkembangan penanganan stunting di Kabupaten Blitar yang penurunannya masih relatif kecil sebagaimana dipaparkan di atas dan adanya riset gab dari hasil penelitian terdahulu dimana partisipasi masyarakat dalam upaya penanganan stunting bervariasi, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam implementasi kebijakan atau program pencegahan dan penanganan stunting di Kabupaten Blitar. Diharapkan dari kajian ini akan dapat menggali lebih dalam urgensi partisipasi masyarakat terhadap pencapaian target penurunan stunting.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dimana peneliti mengeksplor dan memotret seluruh situasi sosial berdasarkan fakta yang ada yang akan diteliti secara luas, menyeluruh dan lebih mendalam. Menurut Miles and Huberman (1992) analisis kualitatif terdiri dari tiga alur kegiatan, yang dimana ketiganya terjadi secara bersamaan (interaktif), yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Blitar, Jawa Timur. Dalam hal ini peneliti memilih lokasi ini untuk menganalisis Partisipasi Masyarakat terhadap upaya penurunan angka Stunting yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Blitar dikarenakan Upaya penanganan stunting termasuk berhasil. Fokus penelitian ini pada partisipasi yang dalam hal ini dilihat dari keterlibatan masyarakat

dan swasta dalam aksi konvergensi Pemerintah Kabupaten Blitar untuk menurunkan angka Stunting. Pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan dokumenter.

Tabe 1. Fokus dan dimensi penelitian

No	Fokus	Dimensi	Informan Penelitian dan Sumber data
1	Strategi penanganan stunting kabupaten Blitar	- strategi dan program penanganan stunting - Koordinasi dalam penanganan stunting	TPPS kab. Blitar, Kepala PPKBP3A, Kepala bidang sosial pemerintahan, Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar
2	Partisipasi masyarakat dan swasta dalam aksi konvergensi penanganan stunting	- Jenis dan tingkat partisipasi dalam aksi konvergensi penanganan stunting	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, kecamatan, perangkat desa, dan masyarakat. Data Primer
3	Perkembangan Kasus Stunting	- Data stunting dari tahun ke tahun secara rinci per kecamatan di kabupaten Blitar	Dinas kesehatan, BKKBN., PPKBP3A Data sekunder

Hasil dan Pembahasan

Strategi dan Program Penanganan Stunting di Kabupaten Blitar

Upaya pemerintah Kabupaten Blitar dalam pencegahan dan penanganan stunting sejak tahun 2020 dapat dikatakan membuahkan hasil yang baik. Kabupaten Blitar menduduki peringkat ke-11 dari 38 Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Tercatat penurunan prevalensi stunting dari tahun - ketahun meskipun belum bisa digolongkan berhasil karena angka prevalensi stunting masih di atas 14 %. Program rutin yang dijalankan Kabupaten Blitar untuk penanganan stunting antara lain melakukan deteksi dini balita stunting melalui program Posyandu, melakukan monitoring dan evaluasi data stunting secara berkala, program makanan tambahan untuk balita dan ibu hamil, pemberian tablet tambah darah bagi remaja putri dan ibu hamil, serta yang penting juga adalah melakukan edukasi kepada Bidan dan Masyarakat.

Untuk percepatan penanganan dan penurunan stunting, pemerintah Kabupaten Blitar juga mencanangkan kelima strategi meliputi:

- 1) Peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di lembaga pemerintah daerah,

- 2) Peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat,
- 3) Peningkatan konvergensi intervensi spesifik dan intervensi sensitif lembaga pemerintah daerah dan pemerintah desa,
- 4) Peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga dan masyarakat,
- 5) Penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

Koordinasi dalam penanganan stunting di Kabupaten Blitar

Dalam rangka percepatan penanganan stunting Bupati Kabupaten Blitar menyatakan ada 26 Desa dari 12 Kecamatan yang menjadi prioritas penanganan stunting. Untuk itu diperlukan koordinasi dan Kerjasama yang efektif melalui aksi kovergensi diantara instansi terkait yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Kesehatan, serta Perangkat Daerah terkait yang didampingi oleh TIM pendamping Koordinator Provinsi Jawa Timur. Konvergensi percepatan pencegahan stunting adalah intervensi yang dilakukan secara terkoordinir, terpadu, dan bersama-sama mensasar kelompok sasaran prioritas yang tinggal di desa untuk mencegah stunting.

Sesuai dengan amanah Perpres nomor 72 tahun 2021, pemerintah Kabupaten Blitar berdasarkan Peraturan Bupati Blitar nomor:188/118/406/ KPTS/2022 membentuk Tim Percepatan penurunan stunting. Sebagaimana hasil wawancara dengan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) sebagai berikut:

“Dengan adanya pembentukan tim Satgas percepatan penurunan stunting, dimana nanti di masing-masing desa dan Kecamatan itu nanti akan dibentuk dari tim itu adalah salah satu strategi untuk semakin mempercepat ya dan semakin kita bisa lebih mendeteksi adanya potensi-potensi stunting. Sehingga kalau memang diketahui ada hal seperti itu segera kita sikapi untuk bersama-sama diadakan pendampingan dan penanganan yang lebih baik untuk menjadi lebih sehat”. (Wawancara, April 2023).

Tim percepatan penurunan stunting ini tidak hanya berada di level Kabupaten namun juga menyebar hingga ke level kecamatan dan desa. Sebagaimana yang disampaikan Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPKBP3A) sebagai berikut:

“ tentu untuk mempercepat penurunan stunting akan melibatkan semua lintas OPD yang terintegrasi sampai ke level kecamatan dan desa...jadi nanti akan disikapi dengan dibentuk keputusan tim percepatan penurunan stunting. Pembentukan tim percepatan penurunan stunting diproses di masing-masing kecamatan maupun desa, nanti bervariasi yang jelas diserahkan sesuai kearifan dari Kecamatan maupun desa masing-masing” (wawancara, April 2023).

Tim percepatan penanganan stunting melakukan 8 (delapan) aksi konvergensi sesuai arahan pemerintah pusat sebagai berikut:

- 1) Analisis Situasi. Mengidentifikasi sebaran prevalensi stunting, ketersediaan program, dan praktek manajemen layanan di Kabupaten/Kota, termasuk kendala dalam pelaksanaan integrasi intervensi gizi.
- 2) Rencana Kegiatan. Menyusun rencana kegiatan untuk meningkatkan pelaksanaan integrasi intervensi gizi yang merupakan tindak lanjut Kabupaten/Kota untuk merealisasikan hasil rekomendasi dari tahap analisis situasi.
- 3) Rembuk Stunting. Menyelenggarakan kegiatan Rembuk Stunting tingkat Kabupaten/Kota yang merupakan pertemuan lintas OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan masyarakat untuk memastikan terjadinya konvergensi program/kegiatan dan pembiayaan.
- 4) Perbup/Perwali tentang Peran Desa. Membuat peraturan untuk memberikan kepastian hukum yang dapat digunakan sebagai rujukan oleh Desa untuk merencanakan, menganggarkan dan melaksanakan program/kegiatan percepatan pencegahan stunting.
- 5) Pembinaan Kader Pembangunan Manusia. Membina kader pembangunan yang berasal dari kaderposyandu, guru PAUD, dan kader lainnya di tingkat desa.
- 6) Sistem Manajemen Data. Membangun dan meningkatkan sistem pengelolaan data di tingkat Kabupaten/Kota hingga desa yang akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan intervensi gizi spesifik dan sensitif.
- 7) Pengukuran dan Publikasi Data Stunting. Mengukur dan mempublikasikan angka prevalensi stunting tingkat Desa hingga Kabupaten/Kota.
- 8) Review Kinerja Tahunan. Melakukan penilaian oleh Pemerintah Kabupaten/Kota terkait kinerja pencegahan stunting selama 1 tahun terakhir.



Gambar: 8 aksi konvergensi dalam penanganan stunting

Sumber: Petunjuk Teknis Penilaian Kinerja 8 Aksi Konvergensi Penurunan Stunting, Sekretariat Wapres, 2021

Keberhasilan aksi konvergensi penanganan stunting tersebut tentu memerlukan kerjasama dan koordinasi yang efektif antar pihak-pihak terkait yang dimulai dari analisis situasi. Analisis situasi bagian awal dari penyusunan rencana program penurunan stunting yang diadakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Blitar bersama dinas kesehatan yang melibatkan berbagai perangkat daerah. Perangkat daerah tersebut antara lain meliputi dinas PPKB3A, dinas kesehatan, dinas Pendidikan, dinas pertanian, dinas peternakan dan perikanan, dinas perumahan dan pemukiman, dinas sosial, dinas kependudukan dan pencatatan sipil, dinas komunikasi dan informatika, dinas pemberdayaan masyarakat desa. Analisis situasi ini dengan tujuan dapat memperoleh data-data yang mendukung pengambilan keputusan dan perencanaan program kegiatan yang relevan dan tepat sasaran. Sebagaimana hasil wawancara dengan kepala bidang sosial pemerintahan kabupaten Blitar sebagai berikut:

“rapat teknis dalam rangka analisis situasi ini sudah diadakan sebanyak 2 kali ya tujuannya untuk mereshuffle Kembali peran masing-masing OPD dan yang terpenting untuk mengupdate pemahaman OPD terkait data-data pendukung yang disediakan oleh Kementerian Dalam negeri yang sudah ada di dashboard stunting. Setelah memahami data dukung kemudian merumuskan program kegiatan penurunan stunting yang terarah” (wawancara, April 2023).

Dari hasil analisis situasi diperoleh pemetaan sasaran program percepatan penurunan stunting yaitu ada 32 desa dari 12 kecamatan yang harus mendapat perhatian. 12 Kecamatan tersebut yaitu: Kecamatan Kademangan, Kanigoro, Sunankulon, Garum, Gandusari, Selopuro, Wates, Bakung, Selorejo, Udawawu, Wlingi Dan Doko. Untuk itu sangat diperlukan koordinasi dan kerjasama berbagai pihak lintas perangkat daerah, organisasi masyarakat, perguruan tinggi, forum CSR dan lain-lain (klikwarta.com., 13 Juli 2022).

Partisipasi Masyarakat dalam Aksi Konvergensi Penanganan Stunting di Kabupaten Blitar

Upaya percepatan penanganan stunting selain melibatkan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD) dan menjalankan aksi konvergensi yang efektif dan efisien diperlukan peran serta atau partisipasi Masyarakat dan pihak-pihak di luar pemerintahan seperti pihak swasta dan organisasi kemasyarakatan. Pelibatan partisipasi Masyarakat dan swasta dalam merealisasikan 8 aksi konvergensi tersebut paling tidak dilakukan pada tahap rembug stunting, pembinaan kader pembangunan manusia serta evaluasi kinerja.

Aksi konvergensi penanganan stunting yang pertama adalah analisis situasi. Analisis situasi ditujukan untuk lebih memahami masalah dan kemudian digunakan untuk merancang program penanganan stunting yang efektif. Melibatkan masyarakat dalam analisis situasi sebenarnya adalah hal yang penting, namun Pemerintah Kabupaten Blitar belum melibatkan Masyarakat melainkan masih dilaksanakan intern perangkat daerah. Demikian pula dengan pelaksanaan aksi konvergensi penanganan stunting yang kedua yaitu penyusunan rencana kegiatan, dimana pada tahap ini tidak ditemukan adanya keterlibatan atau partisipasi masyarakat secara langsung.

Aksi konvergensi ketiga adalah rembug stunting. Kabupaten Blitar mengadakan rembug stunting pada bulan Juli tahun 2022 dimana rembug stunting tersebut melibatkan seluruh elemen

baik dari pemerintah, Masyarakat dan swasta. Sebagaimana wawancara dengan salah satu informan dari unsur kepala Desa yang menjadi peserta rembug stunting sebagai berikut:

“ ya saya hadir disana dari unsur kepala desa banyak selain saya juga ada yang desa-desa yang jadi sasaran program...di kampung coklat untuk rembug stunting. Yang datang banyak ya semua ada dari pemerintah kabupaten dari Kesehatan, pemberdayaan Masyarakat, kependudukan, BKKB, vcamat-camat juga hadir. Kalau yang dari dprd itu ada dari komisi IV, ada juga dari PKK, fatayat, muslimat, bidang desa ada juga dari forum CSR....pokoknya semua unsur ikut “ (wawancara, April 2023).

Bentuk partisipasi dalam rembug stunting dapat dikategorikan sebagai partisipasi ide atau gagasan dalam rangka mewujudkan kepentingan bersama. Sebagaimana pendapat Cohen dan Uphoff (dalam Sagita, 2016), partisipasi ide dan gagasan ini para pihak diharapkan memberikan masukan dalam menentukan arah dan orientasi pembangunan melalui forum-forum koordinasi, seperti rembug stunting ini.

Aksi konvergensi penanganan stunting berikutnya adalah pembinaan kader pembangunan manusia. Dalam kegiatan ini melibatkan pihak swasta dan masyarakat. Partisipasi dari unsur swasta datang dari Dexa medica yang menjalin kerjasama dengan pihak pemerintah kabupaten Blitar dalam memberi edukasi bagi para Bidan tentang perlunya ASI, karena Bidan berperan sebagai garda terdepan dalam menjaga Kesehatan ibu dan anak. Partisipasi pihak swasta ini jika dilihat dari jenjangnya dapat dikategorikan sebagai partisipasi partnership yang merupakan jenjang keenam dari delapan jenjang partisipasi menurut Arnstein (Daniati, 2019); (Tanod et al., 2014). Dalam partisipasi partnership ini, pihak swasta mempunyai peran yang menentukan dalam mencapai keberhasilan penurunan stunting. Dalam konteks ini Pemerintah membagi peran kepada pihak swasta untuk andil dalam pencegahan stunting melalui edukasi kepada para Bidan.

Selain edukasi bagi para Bidan, sebagai bagian dari aksi kovergen dalam penanganan stunting yang melibatkan partisipasi masyarakat adalah pembinaan kader pembangunan manusia yaitu aksi konvergen yang kelima. Pemerintah kabupaten Blitar telah menyelenggarakan pembinaan dimana kader pembangunan manusia ini dipilih dari unsur masyarakat yang mempunyai kepedulian terhadap masalah-masalah pembangunan manusia. Kader Pembangunan manusia ini dipilih melalui musyawarah desa dari unsur kader posyandu, guru PAUD dan kader lainnya. Adapun tugas Kader Pembangunan Manusia (KPM) membantu pemerintah dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi Pembangunan manusia di desa dalam rangka mencegah dan menurunkan kasus stunting.

Peranserta kader Pembangunan manusia ini jika dilihat dari jenjang partisipasi Ernstein dapat dikategorikan kedalam jenjang Placation, dimana masyarakat yaitu para kader mulai dilibatkan secara aktif dalam menjalankan program pemerintah. Sehingga sedikit banyak para kader ini sudah mempunyai pengaruh dalam mendukung keberhasilan program penanganan stunting.

Sedangkan kegiatan masyarakat dalam mengikuti dan menerima program pemerintah untuk penurunan stunting antara lain dalam program Posyandu, Program pemberian makanan tambahan,

tablet tambah darah, ibu hamil dan program bantuan sosial sesungguhnya bukanlah partisipasi. Kondisi tersebut jika diklasifikasikan sesuai jenjang partisipasi Arnstein lebih tepat dimasukkan kedalam kategori nonparticipation karena Masyarakat tidak terlibat dalam pengambilan keputusan melainkan Masyarakat sebagai kelompok sasaran yang mengikuti program tersebut. Hal ini berbeda dengan analisis beberapa peneliti terdahulu yang memasukkan keikutsertaan masyarakat dalam program penurunan stunting seperti kelas ibu hamil, posyandu dan lain-lain dikategorikan sebagai partisipasi Masyarakat (Aulia, Asri, 2021; sartika, 2021).

Tabel 2. Jenis Program dan Peran Masyarakat

No	Nama Program	Peran Masyarakat
1	Posyandu	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat datang untuk membawa anaknya mengikuti posyandu - Salah satu dari masyarakat desa setempat menyediakan rumahnya untuk kegiatan posyandu
2	Bansos	Masyarakat datang dan menerima bantuan dari Pemerintah
3	Sosialisasi dan Edukasi	Masyarakat datang untuk mengikuti sosialisasi dan edukasi
4	Screening anemia rematri dan pemberian tablet tambah darah	<ul style="list-style-type: none"> - Siswa mengikuti kegiatan screening anemia dan pemberian tablet tambah darah - Siswa sebagai kader sekolahan membantu petugas kesehatan dalam mencatat kegiatan screening anemia
5	Kelas Ibu Hamil	Masyarakat yang sedang hamil datang untuk mengikuti kelas ibu hamil

Sumber: data primer

Selanjutnya penelitian ini belum menemukan data riil keterlibatan atau partisipasi Masyarakat dalam aksi konvergensi penanganan stunting terkait sistem manajemen data. Sedangkan partisipasi swasta dalam publikasi data stunting telah banyak dilakukan, antara lain melalui publikasi media online yang dikelola swasta. Jenis partisipasi ini termasuk partisipasi dalam evaluasi, dimana dengan mempublikasikan data stunting memungkinkan pihak pemangku kepentingan dan Masyarakat untuk mengevaluasi keberhasilan program percepatan penurunan stunting. Media yang dikelola pihak swasta yang turut mempublikasikan stunting di kabupaten Blitar antara lain databox (katadata), mediaindonesia.com, bidiknews, jatimsmartid, dan masih banyak lagi media swasta.

Aksi kovergensi penanganan stunting yang terakhir adalah review kinerja tahunan. Review kinerja tahunan dilakukan melalui monitoring dan evaluasi Percepatan Penurunan Prevalensi Stunting. Monev yang diadakan pemerintah kabupaten Blitar ini diikuti oleh perangkat daerah dan desa yang ikut andil dalam percepatan penurunan stunting, tenaga ahli pemberdayaan Masyarakat, ormas-ormas Perempuan seperti Fatayat, Aisyiyah, Muslimat NU, TP PKK dan bahkan ada dari USAID. Pemerintah Provinsi selanjutnya membentuk Tim penilai kinerja pelaksanaan 8 Aksi konvergensi penanganan stunting yang terdiri dari unsur perangkat daerah Provinsi, perwakilan akademisi, lsm/ormas, serta organisasi profesi yang terkait penurunan stunting. Partisipasi atau keterlibatan Masyarakat dalam penilaian kinerja diwakili oleh beradaan akademisi, lsm/ormas, dan

organisasi profesi. Jika dikaitkan dengan teori jenjang partisipasi dari Arnstein maka dapat dikategorikan sebagai partisipasi partnership, karena dalam tim penilaian kinerja baik unsur Masyarakat dan pemerintah bekerjasama untuk menjalankan tugas yang sama.

Berdasarkan hasil atau temuan penelitian ini maka dapat dipetakan partisipasi masyarakat dan pihak swasta dalam aksi konvergensi penanganan stunting di kabupaten Blitar dan hasilnya dapat dirangkum dalam matrik di bawah ini:

Aksi Konvergensi	Pelibatan pihak swasta	Pelibatan masyarakat	Jenis Partisipasi
Analisis Situasi	-	-	-
Rencana kegiatan	-	--	-
Rembug Stunting	Ada	Ada	Partisipasi ide/gagasan
Perbub/Perwali ttg Peraturan Desa	-	-	-
Pembinaan kader	Ada	Ada	Partisipasi Partnership (swasta) Partisipasi Placation (Masyarakat)
Sistem manajemen data stunting	-	-	-
Pengukuran dan publikasi Data stunting	Ada		Partisipasi Evaluasi
Review kinerja tahunan	Ada	Ada	Partisipasi Partnership

Simpulan dan Saran

Stunting merupakan masalah serius yang harus ditanggulangi tidak hanya oleh pemerintah namun memerlukan kontribusi sinergis seluruh unsur baik pihak swasta dan masyarakat secara luas. Oleh karenanya Pemerintah Pusat menetapkan 8 (delapan) aksi konvergensi penanganan stunting guna mencapai target penurunan prevalensi stunting sebesar 14 % pada tahun 2024 mendatang. Seluruh daerah mulai tingkat provinsi, kabupaten/kota hingga desa diharapkan juga menempatkan penanganan stunting menjadi prioritas utama dalam program pembangunan manusia di daerah masing-masing. Guna mendukseskan pelaksanaan aksi konvergensi tersebut partisipasi masyarakat menjadi hal yang krusial. Mengingat pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan tumbuh kembang balita mereka sejak dalam kandungan melalui pengetahuan, kesadaran dan kemauan menjada kecukupan gizi anak-anak yang tumbuh di lingkungan masyarakat itu sendiri. Untuk itu penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana partisipasi Masyarakat dalam pelaksanaan aksi konvergensi di Kabupaten Blitar.

Kabupaten Blitar merupakan salah satu daerah yang memiliki komitmen tinggi terhadap penanganan kasus stunting, terbukti dengan angka prevalensi stunting yang lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata prevalensi stunting di Jawa Timur. Namun demikian semangat untuk menurunkan angka stunting terus ditingkatkan agar dapat mencapai target 8 % pada tahun 2024. Sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat, kabupaten Blitar membentuk Tim Percepatan Penanganan dan Penurunan Stunting (TPPS) dan melaksanakan 8 aksi konvergensi penanganan stunting.

Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bagaimana partisipasi masyarakat dan swasta dalam pelaksanaan delapan aksi konvergensi penanganan stunting di kabupaten Blitar pada beberapa kegiatan yaitu rembug stunting, pembinaan kader pembangunan manusia, publikasi data dan review kinerja tahunan. Namun partisipasi tidak ditemukan pada kegiatan analisis situasi, penyusunan rencana kegiatan, penyusunan Perbup/perwali, system manajemen data dan pengukuran data stunting. Adapun jenis partisipasi masyarakat dan swasta dapat dikategorikan menurut jenjang partisipasi Arnstein sebagai partisipasi ide/gagasan, partisipasi plaction, partnership, dan evaluasi.

Saran yang dapat diberikan berdasarkan hasil penelitian ini adalah bahwa dalam pelaksanaan aksi konvergensi penanganan stunting harus benar-benar berorientasi pada masyarakat baik sebagai sasaran program maupun sebagai aktor implementasi program. Masyarakat harus lebih diberdayakan sebagai aktor dalam implementasi program penanganan stunting secara konvergen. Partisipasi masyarakat dapat difasilitasi dalam forum-forum yang lebih kecil sehingga permasalahan konkrit yang dialami setiap keluarga atau ibu hamil yang rentan terjadinya stunting benar-benar dapat diketahui dan diberikan tindakan intervensi yang relevan dengan permasalahan spesifik yang dialami.

Daftar Pustaka

- Anna, Sartika (2021) *Partisipasi Masyarakat Dalam Menangani Masalah Stunting Di Jorong Padang Lawas Kecamatan Luhak Nan Duo Kabupaten Pasaman Barat*. Sarjana thesis, STKIP PGRI Sumatera Barat. Diakses dari <http://repo.stkip-pgri-sumbar.ac.id/id/eprint/12506>
- Aulia, Asri. (2023). Partisipasi Masyarakat dalam konvergensi penanganan stunting pada tingkat Kecamatan di Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. Tesis. Diakses dari <http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/14163>
- Daniati, S. (2019). Tingkat Partisipasi Masyarakat pada Perencanaan Penggunaan Dana Desa Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan di Desa Kesimantengah. *Jurnal Ilmu Administrasi Publik (JIAP)*, 5(2), 172-180.
- Dewi, Fuaida Kusuma (2021). [Kajian Partisipasi Masyarakat Dan Upaya Keluarga Dalam Penanggulangan Masalah Stunting Di Posyandu Sakura Dusun Gumulan Caturharjo Pandak Bantul](http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/6154). Diakses dari <http://eprints.poltekkesjogja.ac.id/6154>
- Dwiningrum, S.I.A. (2011). *Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Hetifa Sj, Sumarto. (2003). *Inovasi, Partisipasi dan Good Governance*, Bandung: Yayasan Obor Indonesia.
- Indriani, C., Asang, S., Hans, A. (2021). Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Perencanaan Pembangunan di Desa Pali Kecamatan Bittuang Kabupaten Tana Toraja. *Development Policy and Management Review (DPMR)*, 1(1), 57-67.
- Kali, A. (2011). Analisis partisipasi masyarakat terhadap perencanaan dan pembangunan pltmh di paneki desa pombewe kecamatan biromaru kabupaten sigi. *MEKTEK*, XIII(3), 161-168.

- Nurbudiwati, Kania, I., Purnawan, A., & Mufti, I. (2020). *PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PENCEGAHAN STUNTING DI Kabupaten Garut*.
- Sagita, N.I. (2016) Partisipasi Warga Masyarakat Dalam Penilaian Kinerja Kecamatan Di Kota Bandung. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Cosmogov*. 2 (2). 308-329.
- Suryono, Agus. (2001). *Teori dan Isi Pembangunan*. Malang: Universitas Negeri Malang. UM Press
- Tanod, S. T., Rengkung, M. M., & Tondobala, L. (2014). PARTISIPASI MASYARAKAT KECAMATAN MADIDIR TERHADAP PROGRAM PENGELOLAAN SAMPAH KOTA BITUNG. *Sabua*, 6(3), 263–272.
- Waliyudin, M. F., Ningsih, I. W., & Susanti, E. (2023). *KOORDINASI DALAM UPAYA PERCEPATAN PENURUNAN DAN PENCEGAHAN Koordinasi Dalam Upaya Percepatan Penurunan Dan Pencegahan Stunting Di Kabupaten Kuningan*. April.
<https://doi.org/10.24198/jane.v14i1.41332>
- Warouw, F., Ruang, R. T., Tata, R., Tata, R., Kawasan, R., Provinsi, S., Tata, D., Kabupaten, R., Tata, R., Kawasan, R., Kabupaten, S., Detail, R., Ruang, T., Tata, R., & Kawasan, R. (2013). *MEDIA MATRASAIN TINJAUAN “ ANALYTICAL SCALE OF PARTICIPATION ” TERHADAP PERAN SERTA MASYARAKAT DALAM KEBIJAKAN PENATAAN RUANG DI*. 10(2), 1–9.
<https://jatimsmart.id/2022/07/12/pemerintah-kabupaten-blitar-siapkan-langkah-strategi-atasi-stunting>